

IMPLIKASI PENDIDIKAN PANCASILA PADA MAHASISWA TERHADAP KEPEDULIAN ISU SOSIAL

Annisa Kartika Fadilla, Alfina Dwi febriyanti, Firmansyah Arif Hidayat
Universitas Bandar Lampung

E-mail: 23111031@student.ubl.ac.id, 23111059@student.ubl.ac.id,
23111081@student.ubl.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter siswa, memastikan mereka tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga memiliki rasa kesadaran sosial yang kuat. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bermasyarakat, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral yang membantu siswa berperilaku etis, mengembangkan semangat kebangsaan, dan peduli terhadap lingkungan sosialnya. Namun, pengaruh globalisasi dan modernisasi telah menggeser fokus sebagian siswa ke arah sikap individualistik dan materialistik, yang telah melemahkan semangat gotong royong dan kesadaran sosial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pendidikan Pancasila terhadap kesadaran sosial siswa dan mengidentifikasi cara-cara untuk memperkuat peran pendidikan Pancasila agar lebih efektif dalam menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila terutama martabat manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berperan penting dalam mengembangkan empati, tanggung jawab sosial, dan kesadaran moral pada siswa. Untuk meningkatkan efektivitasnya, pendidikan Pancasila perlu diimplementasikan melalui pendekatan kontekstual dan praktis seperti kegiatan sosial, proyek pengabdian masyarakat, dan pembelajaran berbasis isu-isu sosial. Dengan demikian, pendidikan Pancasila dapat berfungsi optimal sebagai sarana pembentukan generasi muda yang berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan, dan berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Globalisasi; Karakter mahasiswa; Keadilan Sosial; kepedulian Sosial; Pendidikan Pancasila

ABSTRACT

Education on Pancasila plays a key role in shaping the character of students so they excel not just academically, but also have a strong sense of social awareness. As the foundation of the nation and the way of life for the people, Pancasila serves as a moral guide that helps students behave ethically, have a national spirit, and care about their social environment. However, the influence of globalization and modernization has shifted the focus of some students toward individualistic and materialistic attitudes, which has reduced their spirit of cooperation and social concern. This study aims to analyze the impact of Pancasila education on students' social concern and to identify ways to strengthen the role of Pancasila education to make it more effective in cultivating human values and social solidarity. The findings show that the values of Pancasila—especially human dignity and civilization, and social justice for all Indonesian people—play an important role in developing students' empathy, social responsibility, and moral awareness. To improve its effectiveness, Pancasila education

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 589

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/sindoro.v1i2.360

Copyright: Author

Publish by: SINDORO



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

needs to be implemented through contextual and practical approaches such as social activities, community service projects, and learning based on social issues. In this way, Pancasila education can function optimally as a means of shaping young people who have good character, national awareness, and a commitment to human values and social justice.

Keywords: *Globalization; Student Character; Social Justice; Social Awareness; Pancasila Education*

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan di semua perguruan tinggi di Indonesia. Sebagai landasan ideologi bangsa, Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter mahasiswa agar tidak hanya cerdas, tetapi juga berjiwa kebangsaan, beretika, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Dalam konteks kampus dan masyarakat yang semakin kompleks, nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat menjadi pedoman moral dan standar perilaku dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, budaya, dan politik. Namun, di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi, kesadaran sosial mahasiswa seringkali bergeser.

Banyak mahasiswa lebih berfokus pada pengembangan akademik dan karier pribadi, sementara kepekaan terhadap isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, atau kerusakan lingkungan mulai menurun. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif pendidikan Pancasila dalam menanamkan kepedulian sosial pada mahasiswa.

Oleh karena itu, penting untuk memahami kembali bagaimana pendidikan Pancasila memengaruhi pengembangan karakter mahasiswa, terutama dalam meningkatkan empati dan kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Melalui pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila secara mendalam, diharapkan peserta didik dapat tumbuh menjadi generasi muda yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa agar berwawasan kebangsaan, beretika, dan peduli terhadap lingkungan sosialnya. Sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila tidak sekadar dipahami sebagai ajaran, melainkan sebagai pandangan hidup yang patut direfleksikan dalam sikap dan tindakan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda penerus bangsa.

Nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan Pancasila keagamaan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dimaksudkan sebagai landasan moral bagi mahasiswa dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial.

Dengan memahami nilai-nilai tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kesadaran sosial, menghargai perbedaan, dan berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Namun, pada kenyataannya, laju pembangunan dan pengaruh globalisasi seringkali membuat sebagian mahasiswa kurang peduli terhadap permasalahan sosial di sekitarnya.

Fenomena seperti individualisme, apatisme, dan menurunnya semangat gotong royong semakin nyata, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi efektivitas pendidikan Pancasila dalam menanamkan kepedulian sosial di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, penting untuk memahami seberapa besar kontribusi pendidikan Pancasila dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya berpengetahuan dan sukses, tetapi

juga berempati, bertanggung jawab secara sosial, dan berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan inti dari Pancasila itu sendiri.

Sebagai dasar dan ideologi bangsa, Pancasila bukan sekadar konsep normatif, tetapi juga harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan nyata, terutama di kalangan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Saat ini, derasnya arus informasi dan gaya hidup praktis seringkali membuat peserta didik lebih berfokus pada pencapaian pribadi daripada kepedulian terhadap masyarakat.

Situasi ini menjadi tantangan bagi sistem pendidikan, terutama bagi para guru Pancasila, untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan secara kontekstual dan bermakna.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji seberapa besar pengaruh pendidikan Pancasila terhadap kepedulian sosial peserta didik, dan bagaimana upaya penguatan peran mata pelajaran ini dapat membantu melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter, etika, dan tanggung jawab sosial yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaruh pendidikan pancasila terhadap tingkat kepedulian mahasiswa pada isu sosial?
2. Bagaimana upaya penguatan peran pendidikan pancasila agar lebih efektif menumbuhkan kepedulian sosial mahasiswa?

PEMBAHASAN

PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN KARAKTER SOSIAL

Pancasila merupakan falsafah dan landasan moral bangsa Indonesia, yang menjadi pedoman dalam membentuk watak, kepribadian, dan kesadaran sosial masyarakat, termasuk peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Sebagaimana dijelaskan Zainudin Hasan (2024) dalam jurnal Perkara, Pancasila berperan penting dalam mewujudkan keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial karena nilai-nilainya menjadi landasan moral dan hukum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menegaskan bahwa “Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berfungsi sebagai pedoman moral dan landasan bagi sistem hukum Indonesia yang adil dan beradab” (Hasan, Perkara, 2024, hlm. 139).¹

Dalam konteks pendidikan tinggi, pandangan ini menegaskan bahwa pendidikan Pancasila bukan sekadar doktrin normatif, melainkan sarana internalisasi nilai-nilai yang dapat membentuk kesadaran moral dan sosial peserta didik.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan empati, menghargai perbedaan, dan menolak perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila berperan strategis dalam menanamkan nilai-nilai yang membimbing

¹ Zainudin Hasan (2025) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (1), 23-214.

peserta didik untuk berpikir kritis dengan tetap berlandaskan etika kebangsaan (Kaelan, 2017; Samani & Hariyanto, 2013).²

Nilai-nilai harkat dan martabat manusia dan peradaban (sila kedua) serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima) merupakan hal yang sentral dalam mengembangkan pola pikir kepedulian sosial di kalangan peserta didik (Wibowo, 2016; Daryanto & Darmiatun, 2013). Kedua sila ini mengajarkan pentingnya menghormati harkat dan martabat manusia, menegakkan keadilan, dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Peserta didik yang memahami nilai-nilai ini didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, baik di kampus maupun di masyarakat, serta peka terhadap ketimpangan sosial di sekitar mereka.

Namun, sebagaimana dikemukakan Zainudin Hasan dalam jurnal JALAKOTEK (2024), tantangan besar muncul akibat pengaruh globalisasi yang mendorong perubahan perilaku generasi muda. Ia menjelaskan bahwa arus globalisasi seringkali membawa budaya konsumerisme dan individualisme yang “secara perlahan dan diam-diam dapat mengubah gaya hidup, perilaku, dan nilai-nilai generasi muda” (Hasan, JALAKOTEK, 2024, hlm. 335). Kondisi ini berpotensi melemahkan nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial yang menjadi inti Pancasila.³

Oleh karena itu, pendidikan Pancasila perlu diimplementasikan secara kontekstual agar peserta didik tidak sekadar memahami Pancasila sebagai teori, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui integrasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam kegiatan akademik dan sosial kampus, peserta didik diharapkan menjadi agen perubahan yang peduli terhadap ketimpangan sosial, terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, dan menolak sikap individualistik yang bertentangan dengan semangat Pancasila (Hasan, 2025, *pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*. Hlm. 23).⁴

Dengan demikian, pendidikan Pancasila berfungsi sebagai alat pembentuk moralitas sosial peserta didik, menjembatani pengetahuan dengan tindakan nyata.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak sekadar membentuk cara berpikir, tetapi juga menjadi landasan pengembangan kesadaran sosial, solidaritas, dan tanggung jawab kemanusiaan yang menjadi ciri utama generasi Pancasila (Noddings, 2013).⁵

KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PANCASILA

Globalisasi telah menyebabkan perubahan besar dalam cara berpikir hidup, dan menilai sesuatu di banyak negara sebagai mana yang dijelaskan YUSDANI (2021), termasuk Indonesia. Menurut Dr. Zainudin Hasan (2024) dalam jurnal JALAKOTEK, globalisasi tidak hanya memengaruhi ekonomi dan teknologi namun juga sangat memengaruhi identitas budaya dan nilai-nilai moral bangsa. Ia menjelaskan bahwa “globalisasi mengubah cara hidup, berperilaku, dan menilai sesuatu secara diam-diam dan tanpa disadari oleh kaum muda,” menjadikan mereka “lebih

² Kaelan. (2017). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
Samani, M., & Hariyanto. (2013). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

³ Hasan, Zainudin, dkk. (2024). *Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila*. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, Vol. 1 No. 2, Juli 2024, hlm. 333-338.

⁴ Zainudin Hasan (2025) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (1), 23-214.

⁵ Noddings, N. (2013). *Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education*. Berkeley: University of California Press.

berfokus pada konsumen, individualistis, dan mulai kehilangan nilai-nilai tradisional bangsa" (Hasan, JALAKOTEK, 2024, hlm. 335).⁶

Perubahan ini berkaitan erat dengan pengaruh budaya global yang menyebar melalui teknologi, media sosial, dan budaya populer. Dr. Hasan mengatakan bahwa globalisasi menyebabkan homogenisasi budaya, di mana nilai-nilai lokal tergeser oleh budaya asing yang mengutamakan gaya hidup praktis dan materialistis. Kaum muda lebih rentan terhadap konsumerisme dan persaingan daripada nilai-nilai seperti kerja sama dan kepedulian sosial yang merupakan inti dari Pancasila. Dalam konteks kehidupan universitas, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya fokus mahasiswa terhadap prestasi akademik dan karier pribadi, sementara kesadaran mereka terhadap masalah sosial dan kemasyarakatan cenderung menurun.

Mahasiswa masa kini seringkali lebih berfokus pada pencapaian pribadi dan kesuksesan individu, yang dianggap sebagai tolok ukur kesuksesan (Rokeach, 1973; Schwartz, 2012) ⁷dalam kehidupan saat ini. Gaya hidup global yang mengutamakan popularitas, status sosial, dan pencapaian ekonomi telah melahirkan pola pikir pragmatis di kalangan mahasiswa. Akibatnya, nilai-nilai seperti empati dan solidaritas sosial semakin melemah karena perhatian terhadap isu-isu kemanusiaan, kepedulian lingkungan, dan keadilan sosial semakin berkurang. Tren ini sejalan dengan temuan Hasan bahwa kaum muda mulai mengadopsi gaya hidup asing yang mungkin tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila mulai dari gaya berpakaian, tutur kata, hingga sikap terhadap masyarakat sekitar (Hasan, JALAKOTEK, 2024, hlm. 336-337).

8

Perubahan nilai ini menghadirkan tantangan besar bagi sektor pendidikan, khususnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat menjadi benteng moral dan ideologis yang memperkuat karakter mahasiswa, menjaga mereka tetap berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan semangat kekeluargaan. Sebagaimana dijelaskan Hasan, globalisasi hendaknya tidak dihadapi dengan penolakan, melainkan dengan penguatan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri dan landasan moral bangsa di tengah perubahan zaman (Hasan, 2025, *pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*)⁹. Pendidikan Pancasila harus mampu menyediakan pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan reflektif agar peserta didik dapat menghubungkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dengan realitas sosial di sekitarnya.

Melalui proses kontekstualisasi nilai, peserta didik dapat memahami bahwa sikap peduli, empati, dan solidaritas bukan sekadar ajaran ideal, melainkan kebutuhan sosial untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembelajaran Pancasila yang relevan dengan realitas sosial seperti melalui kegiatan sosial, proyek kemanusiaan, atau pengabdian masyarakat dapat menjadi wadah yang efektif untuk mengobarkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama.

⁶ Hasan, Zainudin, dkk. (2024). *Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila*. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, Vol. 1 No. 2, Juli 2024, hlm. 333-338.

⁷ Rokeach, M. (1973). *The Nature of Human Values*. New York: Free Press.

⁸ Hasan, Zainudin, dkk. (2024). *Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila*. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, Vol. 1 No. 2, Juli 2024, hlm. 333-338.

⁹ Zainudin Hasan (2025) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (1), 23-214.

Oleh karena itu, tren global yang cenderung mengikis nilai-nilai moral dan sosial hendaknya dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkuat peran pendidikan Pancasila sebagai filter ideologis dan moral bagi peserta didik. Melalui pendidikan yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial (Suryadi, 2019)¹⁰, peserta didik diharapkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial, etika, dan komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa yang bersumber dari Pancasila.

NILAI-NILAI PANCASILA YANG RELEVAN UNTUK MENUMBUHKAN KEPEDULIAN SOSIAL MAHASISWA

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya menjadi landasan bangsa, tetapi juga menjadi pedoman perilaku etis dan moral dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Bagi peserta didik (Kaelan, 2017; Wibowo, 2016)¹¹, nilai-nilai ini menjadi dasar pengembangan karakter dan kesadaran sosial yang kuat. Sebagaimana dijelaskan oleh Zainudin Hasan (2024)¹² dalam jurnal *Perkara*, masing-masing dari kelima sila dalam Pancasila memiliki dimensi nilai yang unik dan saling melengkapi, sehingga turut membentuk kepribadian warga negara Indonesia yang beradab dan adil. Ia menegaskan bahwa “Pancasila merupakan sumber nilai dan norma yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat yang adil dan beradab”. (Hasan, *Perkara*, 2024, hlm. 140; Hasan, 2025. *Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Hlm 62*).¹³

Berdasarkan pandangan ini, nilai-nilai dalam masing-masing dari kelima sila tersebut dapat dikaitkan secara langsung dengan penguatan kepedulian sosial siswa sebagai berikut:

SILA I - Ketuhanan Yang Maha Esa

Siswa pertama mencakup nilai-nilai spiritual dan moral yang menumbuhkan kesadaran bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab moral terhadap sesama. Menurut Hasan (2024), nilai ketuhanan yang maha esa membimbing manusia untuk menjunjung tinggi etika, kebenaran, dan kemanusiaan dalam segala tindakannya. Kesadaran ini menjadi landasan bagi siswa untuk menunjukkan empati, membantu sesama, dan menolak segala bentuk ketidakadilan sosial (Noddings, 2013; Hasan, 2025. *Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Hlm 65*).¹⁴

Pendidikan Pancasila yang mengajarkan nilai ketuhanan yang maha esa dapat membentuk siswa menjadi individu yang berkarakter baik dan berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan universal, bukan hanya pengetahuan teoritis. Untuk memperkuat semangat pluralisme agama dalam kehidupan berbangsa, dapat dilakukan langkah-langkah berikut; Pertama, Pendidikan multikultural dan moderasi beragama di sekolah dan perguruan tinggi. Kedua, Pelatihan kerukunan lintas agama bagi tokoh masyarakat dan aparat pemerintah. Ketiga, Penerbitan buku dan media populer tentang toleransi dan nilai Pancasila. Keempat, Memperkuat peran FKUB

¹⁰ Suryadi, K. (2019). *Pendidikan Pancasila dan Nasionalisme di Perguruan Tinggi*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 28(2), 97-106.

¹¹ Kaelan. (2017). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Samani, M., & Hariyanto. (2013). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

¹² Hasan, Zainudin, dkk. (2024). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2 No. 2, Juni 2024, hlm. 138-150.

¹³ Hasan, Zainudin, dkk. (2024). *Peran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Membangun Persatuan Bangsa*. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2, April 2024, hlm. 57-69.

¹⁴ Hasan, Zainudin, dkk. (2024). *Peran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Membangun Persatuan Bangsa*. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2, April 2024, hlm. 57-69.

dan organisasi lintas agama dalam menyelesaikan konflik.(Hasan, 2025. *Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Hlm 67*).¹⁵

Nilai Ketuhanan juga hadir dalam peringatan hari besar agama sebagai hari libur nasional, doa lintas agama dalam kegiatan resmi negara, pemberdayaan lembaga zakat, rumah ibadah, dan organisasi sosial keagamaan, serta pelestarian budaya religius lokal, seperti nyadran, selamatan, atau tradisi maulid. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan diakui sebagai bagian dari budaya nasional yang memperkuat integrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan bukan hanya bentuk pengakuan terhadap kehadiran Tuhan dalam negara, tetapi juga menjadi sumber moral dan spiritual bagi terciptanya masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis, sesuai dengan visi luhur Pancasila. Untuk memperkuat implementasi nilai Ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut; Pertama, Pendidikan agama yang moderat dan inklusif sejak dini. Kedua, Pelatihan wawasan kebangsaan berbasis Pancasila bagi ASN, guru, tokoh agama. Ketiga, Penguatan dialog antar iman dan kerja sama lintas agama. Keempat, Reformasi kebijakan agar inklusif terhadap semua pemeluk agama dan kepercayaan(Hasan, 2025. *Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Hlm 69*).¹⁶

SILA II - Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Siswa kedua menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dan keadilan sosial. Hasan (2024) menyatakan bahwa nilai kemanusiaan dalam Pancasila mengandung prinsip harkat dan martabat manusia, yaitu pengakuan atas harkat dan martabat setiap individu tanpa diskriminasi.

Keberadaban (civilization, civility) menyiratkan bahwa seluruh interaksi manusia dalam kehidupan bersama harus berlandaskan pada nilai-nilai kesusilaan, norma, etika, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Seseorang yang beradab adalah pribadi yang bertindak dengan kesantunan, tenggang rasa, dan empati, menolak kekerasan dan dehumanisasi, serta menjunjung norma budaya luhur, baik lokal maupun universal(Hasan, 2025. *Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Hlm 72*). Keadilan dan keberadaban bukan dua hal yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam satu sistem nilai kemanusiaan. Tanpa keadilan, keberadaban kehilangan landasannya; tanpa keberadaban, keadilan menjadi kaku, mekanistik, dan bahkan bisa menjadi tirani hukum. Maka dari itu, nilai kemanusiaan harus diwujudkan melalui keadilan yang bermartabat dan keberadaban yang berpihak pada keadilan(Hasan, 2025. *Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Hlm 72*).

Pada intinya, makna umum nilai "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila terletak pada dualisme integratif antara keadilan dan keberadaban. Nilai ini menjadikan manusia sebagai pusat dari seluruh aktivitas kenegaraan, baik dalam hukum, politik, sosial, maupun budaya. Adil adalah substansi struktur sosial yang setara, sedangkan beradab adalah cara manusiawi untuk mewujudkan nilai tersebut(Hasan, 2025. *Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Hlm 73*)¹⁷. Dalam pendidikan, integrasi nilai ini menjadi komponen penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 adalah "mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, adil dan beradab"(Hasan, 2025. *Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Hlm 74*).

¹⁵ Zainudin Hasan (2025) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (1), 23-214.

¹⁶ Zainudin Hasan (2025) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (1), 23-214.

¹⁷ Zainudin Hasan (2025) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (1), 23-214.

Integrasi nilai "adil dan beradab" dalam sila kedua Pancasila merupakan kunci etis-filosofis bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi dan berkeadilan. Adil memberi arah struktural dalam menjamin hak dan kewajiban secara setara, sedangkan beradab memberi arah moral agar struktur tersebut dijalankan dengan cara yang bermartabat. Tanpa integrasi keduanya, nilai kemanusiaan akan kehilangan maknanya dan praktik berbangsa akan kehilangan arah etiknya" (Hasan, 2025. *Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*. Hlm 75)¹⁸. Nilai ini mendorong siswa untuk mengembangkan toleransi, menghormati perbedaan, dan peduli terhadap kelompok rentan atau kurang beruntung. Sila ini juga menegaskan bahwa Dengan menerapkan nilai ini, siswa diharapkan tidak bersikap acuh tak acuh terhadap isu-isu sosial, melainkan aktif memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan solidaritas di lingkungannya (Hasan, *Perkara*, 2024, hlm. 142-143).¹⁹

SILA III - Persatuan Indonesia

Dalam artikelnya di jurnal *Aktivisme* (2024), Hasan menekankan bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika memiliki peran fundamental dalam mempersatukan bangsa di tengah keberagaman. Ia menyatakan bahwa "Persatuan Indonesia harus dicapai melalui rasa saling menghormati antar kelompok dan budaya, sehingga perbedaan menjadi kekuatan sosial, bukan sumber perpecahan" (Hasan, *Aktivisme*, 2024, hlm. 63) (Banks, 2015). Persatuan Indonesia juga mengandung nilai integrasi sosial, yaitu kemampuan berbagai kelompok sosial untuk hidup bersama dalam harmoni, saling melengkapi dan bekerja sama demi kepentingan kolektif. Integrasi sosial sangat penting dalam negara plural seperti Indonesia, di mana ancaman disintegrasi sering muncul akibat konflik identitas atau kepentingan kelompok (Hasan, 2025. *Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*. Hlm 78).²⁰

Dalam bukunya, (Hasan, 2025. *pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*)²¹ mengatakan bahwa Implementasi nilai Persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya berupa slogan atau retorika kebangsaan, tetapi harus direalisasikan dalam bentuk kebijakan publik, sikap warga negara, dan kelembagaan negara. Sila Ketiga adalah nilai praksis yang mewajibkan kita untuk terus memelihara integrasi nasional, memperkuat solidaritas sosial, serta mencegah disintegrasi bangsa.

Salah satu bentuk utama implementasi sila ketiga adalah melalui pendidikan karakter kebangsaan dan pendidikan multikultural. Kurikulum pendidikan harus menanamkan semangat persatuan, cinta tanah air, toleransi, dan saling menghargai dalam keberagaman. Pendidikan tidak boleh menjadi alat penyeragaman, melainkan menjadi wahana untuk membangun kesadaran kolektif akan kebinekaan sebagai kekayaan bangsa. Menurut Tilaar, pendidikan multikultural yang berbasis pada Pancasila dapat menjadi pilar integrasi bangsa dan penghalau benih-benih intoleransi (Hasan, 2025. *Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*. Hlm 80).²²

Dalam konteks kehidupan kemahasiswaan, nilai ini mendorong solidaritas lintas budaya, agama, dan suku. Kampus menjadi tempat mahasiswa belajar hidup bersama meskipun berbeda, mengembangkan semangat toleransi, dan menghindari polarisasi sosial yang dapat menghambat kepedulian terhadap sesama.

¹⁸ Zainudin Hasan (2025) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (1), 23-214.

¹⁹ Hasan, Zainudin, dkk. (2024). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2 No. 2, Juni 2024, hlm. 138-150.

²⁰ Zainudin Hasan (2025) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (1), 23-214.

²¹ Zainudin Hasan (2025) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (1), 23-214.

²² Zainudin Hasan (2025) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (1), 23-214.

SILA IV - Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat menyoroti pentingnya partisipasi aktif, dialog, dan konsultasi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pendidikan, nilai ini mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dengan tetap menghormati nilai-nilai kolektif. Hasan (2024) dalam Perkara menekankan bahwa asas demokrasi rakyat menumbuhkan kesadaran untuk "mengutamakan kepentingan umum dan keadilan di atas kepentingan pribadi" (hlm. 145). Musyawarah merupakan fondasi demokrasi Pancasila yang menekankan pengambilan keputusan bersama secara adil, etis, dan deliberatif. Dalam sila keempat, musyawarah bukan hanya sebuah teknik diskusi, melainkan nilai moral politik yang mendasari seluruh proses kenegaraan. Musyawarah adalah cara bernegara yang mengedepankan keterlibatan, kesetaraan, penghargaan terhadap pendapat, dan pencapaian mufakat (Hasan, 2025. *Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*. Hlm 85).²³

Pendidikan Pancasila yang memuat nilai ini dapat melatih siswa untuk berkomunikasi secara bijak, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kampus, dan secara aktif mengungkapkan kepedulian terhadap isu-isu sosial secara konstruktif dan demokratis.

SILA V - Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sifat kelima merupakan puncak dari semua nilai Pancasila, yang menekankan tanggung jawab sosial dan kesejahteraan kolektif.

Hasan (2024) menyatakan bahwa keadilan sosial bukan hanya asas hukum, tetapi juga pedoman moral untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil (Hasan, Perkara, 2024, hlm. 144)²⁴. Sila kelima Pancasila mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, mencakup bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, budaya, hingga lingkungan. Esensi dari nilai ini adalah menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat, menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta menegakkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Hasan, 2025, hlm. 89-90).²⁵

Nilai yang terkandung dalam sila kelima menekankan pentingnya semangat solidaritas sosial serta kepedulian terhadap kelompok yang kurang berdaya, seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, anak-anak terlantar, dan masyarakat adat. Baik negara maupun warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk saling membantu, memperkuat semangat gotong royong, serta mencegah ketimpangan kekuasaan atau dominasi pihak yang kuat terhadap yang lemah. Prinsip keadilan dalam Pancasila bersifat aktif dan berpihak pada kemanusiaan, karena menegaskan kewajiban moral untuk melindungi serta memberdayakan kelompok rentan (Hasan, 2025, hlm. 91).²⁶

Dalam konteks mahasiswa, nilai ini menjadi dasar untuk mengembangkan kesadaran sosial, seperti keinginan untuk membantu masyarakat miskin, menolak ketimpangan sosial, dan berkontribusi pada program pengabdian masyarakat. Siswa yang memahami prinsip kelima secara mendalam cenderung mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, yang tercermin

²³ Zainudin Hasan (2025) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (1), 23-214.

²⁴ Hasan, Zainudin, dkk. (2024). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2 No. 2, Juni 2024, hlm. 138-150

²⁵ Zainudin Hasan (2025) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (1), 23-214.

²⁶ Zainudin Hasan (2025) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (1), 23-214.

dalam sikap kerja sama timbal balik dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain (Kohlberg, 1981).²⁷

UPAYA PENGUATAN PERAN PENDIDIKAN PANCASILA AGAR EFEKTIF

Memperkuat Peran Pendidikan Pancasila Agar Lebih Efektif Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk generasi muda yang berakarakter, beretika, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Pendidikan berperan sebagai sarana penting dalam membentuk perspektif masyarakat terhadap keberagaman. Melalui pendekatan pendidikan multikultural, setiap individu diajak untuk memahami perbedaan, menumbuhkan rasa saling menghormati, serta mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat (Hasan, 2025, hlm. 210)²⁸. Namun, efektivitasnya seringkali terbatas karena pendekatan pembelajarannya masih bersifat teoritis dan berfokus pada hafalan nilai-nilai, alih-alih menginternalisasi dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Sebagaimana dijelaskan Zainudin Hasan (2024) dalam jurnal Perkara, Pancasila hendaknya tidak dipandang sebagai konsep yang statis, melainkan sebagai ideologi yang hidup dan terus berubah serta beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ia menekankan bahwa “Pancasila bukan hanya sumber hukum dan moral, tetapi juga ideologi yang dinamis dan hidup dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara” (Hasan, Perkara, 2024, hlm. 146)²⁹. Berdasarkan pandangan ini, penguatan pendidikan Pancasila hendaknya berfokus pada pendekatan kontekstual dan praktis agar peserta didik tidak hanya memahami nilai-nilainya secara konseptual (Kohlberg, 1981) (Daryanto & Darmiatun, 2013; Samani & Hariyanto, 2013)³⁰, tetapi juga menerapkannya dalam kegiatan sosial.

Proses pendidikan hendaknya mendorong mahasiswa untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan nyata seperti proyek sosial, Kuliah Kerja Nyata (KKN), program pengabdian kepada masyarakat, dan pembelajaran berbasis isu sosial. Kegiatan-kegiatan ini efektif untuk membangun empati dan tanggung jawab sosial mahasiswa terhadap permasalahan masyarakat seperti ketimpangan sosial, intoleransi, dan kerusakan lingkungan.

Selain itu, Zainudin Hasan (2024) dalam jurnal Aktivisme menekankan bahwa lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, memiliki tanggung jawab ideologis dan moral untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa.

Ia menjelaskan bahwa “kampus hendaknya menjadi ruang pembentukan karakter bangsa yang menumbuhkan tanggung jawab sosial dan memperkuat semangat persatuan dalam keberagaman” (Hasan, Aktivisme, 2024, hlm. 65).³¹

Oleh karena itu, peran dosen dan lembaga pendidikan sangat krusial dalam mentransformasikan pendidikan Pancasila menjadi alat pengembangan karakter dan kesadaran sosial mahasiswa.

Sejalan dengan hal tersebut, Hasan (2024) juga menekankan perlunya pembaruan pendekatan pedagogis agar pendidikan Pancasila tetap relevan dengan tantangan global.

Pembelajaran harus berfokus pada penyelesaian masalah sosial nyata dan dikaitkan dengan isu-isu kontemporer (Schwartz, 2012) seperti perubahan iklim, intoleransi, kemiskinan, dan

²⁷ Kohlberg, L. (1981). *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*. San Francisco: Harper & Row.

²⁸ Zainudin Hasan (2025) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (1), 23-214.

²⁹ Hasan, Zainudin, dkk. (2024). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2 No. 2, Juni 2024, hlm. 138-150

³⁰ Kohlberg, L. (1981). *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*. San Francisco: Harper & Row.

³¹ Hasan, Zainudin, dkk. (2024). *Peran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Membangun Persatuan Bangsa*. Aktivisme: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 2, April 2024, hlm. 57-69.

misinformasi digital. Melalui metode seperti pembelajaran berbasis layanan, pembelajaran berbasis proyek, dan diskusi reflektif, mahasiswa dapat memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam dan kritis, bukan hanya sebagai ideologi, tetapi juga sebagai pedoman moral dan tindakan.

Kampus sebagai lingkungan akademik juga berperan dalam menumbuhkan budaya sosial Pancasila, yaitu suasana yang mendorong kolaborasi, keterbukaan, dan solidaritas.

Implementasi nilai-nilai Pancasila di kampus dapat dilakukan melalui pengelolaan organisasi kemahasiswaan, kegiatan sosial lintas agama dan budaya, serta sistem pembelajaran yang mengedepankan keadilan dan partisipasi. Upaya ini mencerminkan pandangan Hasan bahwa "Pancasila harus menjadi landasan perilaku etis bangsa, yang tercermin dalam setiap tindakan sosial dan praktik kelembagaan" (Hasan, Perkara, 2024, hlm. 147)³².

Oleh karena itu, penguatan pendidikan Pancasila membutuhkan pendekatan yang lebih berpusat pada manusia, partisipatif, dan relevan terhadap kehidupan mahasiswa.

Nilai-nilai Pancasila hendaknya tidak disajikan sebagai diskusi yang kaku, melainkan sebagai pedoman hidup yang menumbuhkan kepedulian, empati, dan semangat gotong royong. Melalui strategi pembelajaran yang reflektif dan praktis, pendidikan Pancasila dapat secara efektif berkontribusi dalam membangun generasi muda yang berkarakter bangsa dan berwawasan sosial yang tinggi terhadap masyarakat di sekitarnya.

Dalam konteks kehidupan berbangsa yang beragam, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika memiliki fungsi strategis sebagai alat pemersatu bangsa dan penangkal fragmentasi sosial. Menurut Zainudin Hasan (2024) dalam jurnal *Aktivisme*, kedua konsep ini bukan hanya simbol persatuan bangsa, tetapi juga landasan moral dan sosial untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan politik. Ia menekankan bahwa "Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah dua pilar ideologis yang mampu mencegah perpecahan sosial dan memperkuat solidaritas nasional dalam keberagaman" (Hasan, *Aktivisme*, 2024, hlm. 61).³³

INTEGRASI PANCASILA, BHINNEKA TUNGGAL IKA, DAN KEPEDULIAN SOSIAL

Bagi mahasiswa, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting dalam membangun sikap toleran, inklusif, dan peduli sosial di lingkungan kampus. Kehidupan kampus yang multikultural dan beragam merupakan contoh kecil dari keberagaman masyarakat Indonesia (Banks, 2015). Oleh karena itu, mahasiswa perlu menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati sebagai wujud pengamalan sila ketiga Pancasila (Persatuan Indonesia) dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam pandangan Hasan (2025), kesatuan bangsa Indonesia tidak dibangun atas dasar keseragaman, melainkan tumbuh dari keberagaman atau pluralitas yang disatukan melalui semangat kebangsaan. Keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan justru menjadi fondasi penting bagi terbentuknya identitas nasional yang bersifat terbuka dan inklusif.

Identitas nasional tersebut memiliki beberapa peranan mendasar, yaitu sebagai perekat sosial yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat, pembeda antara bangsa Indonesia dengan

³² Hasan, Zainudin, dkk. (2024). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2 No. 2, Juni 2024, hlm. 138-150

³³ Hasan, Zainudin, dkk. (2024). *Peran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Membangun Persatuan Bangsa*. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2, April 2024, hlm. 57-69.

bangsa lain, pedoman dalam bersikap dan berperilaku sebagai warga negara, dasar munculnya semangat nasionalisme dan patriotisme, serta benteng pertahanan budaya dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan modernisasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai luhur bangsa (Hasan, 2025, hlm. 214)³⁴. Hasan (2024) juga menuliskan bahwa “perbedaan seharusnya bukan menjadi penghalang persatuan, melainkan sumber kekuatan sosial yang memperkaya kehidupan berbangsa” (hlm. 63).³⁵

Melalui Pendidikan Pancasila, mahasiswa didorong untuk memahami bahwa kepedulian sosial tidak hanya ditunjukkan melalui kegiatan amal, tetapi juga melalui penghormatan terhadap perbedaan dan penolakan diskriminasi.

Dalam masyarakat yang beragam, sikap empati dan toleran merupakan fondasi untuk membangun solidaritas sosial. Pendidikan Pancasila yang terintegrasi dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat memperkuat kesadaran multikultural, yang sangat penting dalam menghadapi meningkatnya intoleransi dan polarisasi sosial di ruang publik dan digital.

Selain itu, Hasan (2024) menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam membangkitkan semangat kebangsaan yang inklusif dan bebas diskriminasi.

Ia menulis bahwa “generasi muda, khususnya mahasiswa, harus menjadi pelopor dalam memperkuat nilai-nilai persatuan dan menjauhkan diri dari fanatisme sempit yang dapat mengancam keutuhan bangsa” (Hasan, Aktivisme, 2024, hlm. 66).³⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya dituntut untuk berpikir kritis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap interaksi sosial.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan kampus dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti forum lintas agama, dialog budaya, proyek sosial bersama, dan organisasi mahasiswa inklusif. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memperkuat solidaritas antar mahasiswa, tetapi juga menjadi wadah pendidikan karakter yang menginternalisasi nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan empati sosial. Dengan demikian, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar diskusi ideologis, melainkan nilai-nilai kehidupan yang membentuk kesadaran sosial mahasiswa dalam menghadapi keberagaman.

Oleh karena itu, mengintegrasikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam pendidikan dan kehidupan kampus merupakan langkah strategis dalam membangun generasi baru yang berpikir terbuka, peduli terhadap sesama, dan mampu menjaga persatuan sosial.

Mahasiswa yang mengamalkan nilai-nilai ini akan memiliki jati diri bangsa yang kuat dan berperan sebagai penggerak perubahan sosial yang dilandasi semangat kemanusiaan dan keadilan sosial (Banks, 2015).³⁷

³⁴ Zainudin Hasan (2025) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (1), 23-214.

³⁵ Hasan, Zainudin, dkk. (2024). *Peran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Membangun Persatuan Bangsa*. Aktivisme: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 2, April 2024, hlm. 57-69

³⁶ Hasan, Zainudin, dkk. (2024). *Peran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Membangun Persatuan Bangsa*. Aktivisme: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 2, April 2024, hlm. 57-69

³⁷ Banks, J. A. (2015). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. New York: Routledge.

KESIMPULAN

Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter dan menumbuhkan kesadaran sosial peserta didik, terutama di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang terus berlangsung. Sebagaimana dijelaskan oleh Zainudin Hasan (2024), Pancasila merupakan falsafah dan landasan moral bangsa yang menjadi pedoman untuk mencapai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila tidak hanya menjadi landasan normatif bernegara, tetapi juga menjadi pedoman moral bagi sikap dan tindakan peserta didik dalam ranah akademik dan kemasyarakatan.

Pembahasan menunjukkan bahwa dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan tinggi, peserta didik dapat mengembangkan empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial yang lebih besar (Noddings, 2013; Wibowo, 2016)³⁸.

Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi landasan utama untuk membangun kesadaran terhadap berbagai permasalahan sosial seperti ketimpangan, intoleransi, dan kemiskinan. Namun, pengaruh globalisasi telah menyebabkan nilai-nilai yang dianut sebagian generasi muda bergeser ke arah individualistis, konsumerisme, dan pragmatis, sebagaimana dijelaskan Hasan dalam JALAKOTEK (2024).³⁹ Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan untuk mengobarkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian sosial di kalangan mahasiswa.

Untuk menjawab tantangan ini, pendidikan Pancasila perlu didekati secara kontekstual dan aplikatif, dengan menekankan praktik-praktik nyata, seperti kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, dan pembelajaran berbasis isu sosial.

Hasan (2024) menegaskan dalam bukunya "Perkara" bahwa Pancasila harus dipahami sebagai ideologi yang hidup dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Oleh karena itu, pendidikan tinggi hendaknya menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan dalam tindakan nyata.

Lebih lanjut, integrasi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana dijelaskan Hasan (2024) dalam "Aktivisme", merupakan aspek krusial dalam memperkuat kesadaran mahasiswa akan keberagaman dan solidaritas sosial.

Kedua prinsip ini berfungsi sebagai pilar ideologis dan moral untuk menjaga kerukunan di tengah keberagaman budaya, agama, dan pandangan politik. Mahasiswa, sebagai agen perubahan, diharapkan mampu mewujudkan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan keadilan sosial dalam kehidupan mereka di kampus dan di masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Pendidikan Pancasila dalam menumbuhkan kepedulian sosial mahasiswa bergantung pada kemampuan lembaga pendidikan untuk menghadirkan pembelajaran yang reflektif, partisipatif, dan relevan dengan konteks sosial. Ketika nilai-nilai Pancasila dihayati dan diamalkan secara nyata, maka mahasiswa tidak hanya menjadi insan akademis yang cerdas, tetapi juga pribadi Pancasila-lais (Samani & Hariyanto, 2013; Suryadi, 2019)⁴⁰ yang berempati, beretika, dan berkomitmen pada kemanusiaan serta keadilan sosial.

³⁸ Noddings, N. (2013). *Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education*. Berkeley: University of California Press.

³⁹ Hasan, Zainudin, dkk. (2024). *Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila*. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, Vol. 1 No. 2, Juli 2024, hlm. 333-338.

⁴⁰Kaelan. (2017). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Samani, M., & Hariyanto. (2013). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publication
- Hasan, Zainudin, dkk. (2024). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2 No. 2, Juni 2024, hlm. 138-150.
- Hasan, Zainudin, dkk. (2024). *Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila*. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, Vol. 1 No. 2, Juli 2024, hlm. 333-338.
- Hasan, Zainudin, dkk. (2024). *Peran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Membangun Persatuan Bangsa*. Aktivisme: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 2, April 2024, hlm. 57-69.
- Daryanto, & Darmiatun, S. (2013). *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kaelan. (2017). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Samani, M., & Hariyanto. (2013). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suryadi, K. (2019). *Pendidikan Pancasila dan Nasionalisme di Perguruan Tinggi*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 28(2), 97-106.
- Wibowo, A. (2016). *Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusdani. (2021). *Revitalisasi Pendidikan Pancasila di Era Globalisasi*. Jurnal Filsafat dan Pancasila, 3(1), 1-12.
- Banks, J. A. (2015). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. New York: Routledge.
- Kohlberg, L. (1981). *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*. San Francisco: Harper & Row.
- Noddings, N. (2013). *Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education*. Berkeley: University of California Press.
- Rokeach, M. (1973). *The Nature of Human Values*. New York: Free Press.
- Schwartz, S. H. (2012). *An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values*. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 1-20.
- Zainudin Hasan (2025) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (1), 23-214.